

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA DAN MANAJEMEN
KEUANGAN DESA TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA PASIE SEUBADEH
KECAMATAN BAKONGAN TIMUR, KABUPATEN
ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S1)

OLEH :

SETIA MAULIDA
NPM 1902120308



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Manajemen
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SETIA MAULIDA
NPM : 1902120308

Dengan judul:

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA DAN MANAJEMEN
KEUANGAN DESA TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA PASIE SEUBADEH
KECAMATAN BAKONGAN TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Manajemen

Suryani Murad, SE, M.Si.
NIK. 19720205 200103 2 001

Pembimbing I

Zuraidah, SE, MM.
NIK. 19770123 200807 2 001

Pembimbing II

Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001



Mengetahui,
Dekan,

Drs. Tarbizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Manajemen
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SETIA MAULIDA
NPM : 1902120308

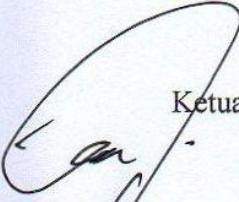
Dengan judul:

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA DAN MANAJEMEN
KEUANGAN DESA TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA PASIE SEUBADEH
KECAMATAN BAKONGAN TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 13 Agustus 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

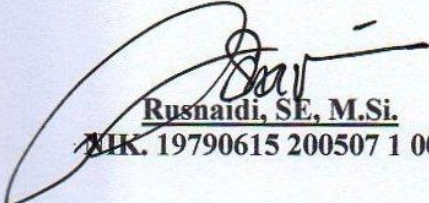
Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

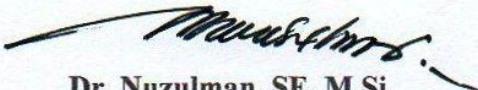
Sekretaris


Zuraidah, SE, MM.
NIK. 19770123 200807 2 001

Anggota


Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Anggota


Dr. Nuzulman, SE, M.Si.
NIK. 19650622 199805 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen


Suryani Murad, SE, M.Si.
NIK. 19720205 200103 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

Yang Menyatakan



SETIA MAULIDA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Setia Maulida

NPM : 1902120308

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA DAN MANAJEMEN KEUANGAN DESA TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA PASIE SEUBADEH KECAMATAN BAKONGAN TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 08 Agustus 2023



Yang Menyatakan

SETIA MAULIDA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa Pasie Seubadeh Aceh Selatan.”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Syiar Islam di atas muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Nadiya, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I, Ibu Syamsidar, SE., M.Si. Ak.CA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Rusnaldi, SE selaku Wakil Dekan II, juga selaku pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan dorongan, arahan dan meluangkan waktunya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Suryani Murad, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

5. Ibu Tuwisna SE, MM. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
6. Ibu Zuraidah, SE, MM Selaku pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan dorongan, arahan dan meluangkan waktunya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, Akademik, dan Karyawan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada jurusan Manajemen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Rekan-rekan, teman dan sahabat-sahabat, angkatan 2019 saya yang telah banyak memberikan dorongan, semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, Semoga Allah SWT akan membalasnya dikemudian hari. *Amin ya Rabbal A'lam.*

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa.....	9
2.1.1.1 Pengertian Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan.....	9
2.1.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan	12
2.1.1.3 Indikator Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan.....	13
2.1.2 Kebijakan Dana Desa	14
2.1.2.1 Pengertian Kebijakan Dana Desa	14
2.1.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dana Desa....	16
2.1.2.3 Indikator Kebijakan Dana Desa.....	21
2.1.3 Manajemen Keuangan Desa	22
2.1.3.1 Pengertian Manajemen Keuangan Desa	22
2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Keuangan Desa	25
2.1.3.3 Indikator Manajemen Keuangan Desa	25
2.2 Penelitian Sebelumnya	26
2.3 Kerangka Pemikiran	30
2.4 Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	32
3.1.1 Tujuan Penelitian	32
3.1.2 Jenis Penelitian.....	32
3.1.3 Horizon Waktu	33
3.1.4 Unit Analisis.....	33
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	34
3.2.1 Populasi.....	34
3.2.2 Sampel Penelitian.....	34
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	35
3.3.1 Sumber Data.....	35

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4 Definisi dan Operasional Variabel	36
3.5 Metode Analisis Data.....	38
3.6 Pengujian Data.....	38
3.6.1 Uji Validitas	39
3.6.2 Uji Reliabilitas	39
3.7 Uji Asumsi Klasik	40
3.7.1 Uji Normalitas.....	40
3.7.2 Uji Multikolinearitas.....	40
3.7.3 Uji Heterokedastisitas	41
3.8 Pengujian Hipotesisi`	41
3.8.1 Uji T (Parsial)	41
3.8.2 Uji F (Simultan)	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Gambaran Umum Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan.....	43
4.2. Karakteristik Responden.....	44
4.3. Hasil Pengujian Data	47
4.3.1 Uji Validitas.....	46
4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen.....	47
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	49
4.4. Analisis Deskriptif.....	52
4.4.1 Variabel Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan ...	52
4.4.2 Variabel Kebijakan Dana Desa.....	54
4.4.3 Variabel Manajemen Keuangan Desa	56
4.5. Pembahasan	57
4.5.1 Pengujian Hipotesis	57
4.5.2 Uji Parsial (uji t)	61
4.5.3 Uji Simultan (uji F).....	62
4.6. Implikasi Hasil Penelitian.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laporan Realisasi Dana Desa Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 s/d 2021	4
Tabel 2.1 Penelitian sebelumnya.....	28
Tabel 3.1 Proses Kegiatan Penelitian.....	33
Tabel 3.2 Skala Likert.....	34
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	37
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	45
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas.....	47
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas variabel penelitian (Alpha)	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	50
Tabel 4.5 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan.....	52
Tabel 4.6 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kebijakan Dana Desa.....	54
Tabel 4.7 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Manajemen Keuangan Desa.....	56
Tabel 4.8 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan.....	58
Tabel 4.9 Model Summary.....	60
Tabel 4.10 Annova	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.	30
Gambar 4. 1 Sruktur Organisasi Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan.....	44
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas.....	49
Gambar 4.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Data Kuesioner

Lampiran 3 Frequency Table Karakteristik Responden

Lampiran 4 Tabel F, Tabel T dan Tabel R

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA DAN MANAJEMEN
KEUANGAN DESA TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIVITAS PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA PASIE SEUBADEH KECAMATAN BAKONGAN
TIMUR, KABUPATEN ACEH SELATAN**

SETIA MAULIDA
NPM : 1902120308

Pembimbing I : Zuraidah, SE, MM
Pembimbing II : Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Dana Desa dan Manajemen Keuangan Desa terhadap Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dengan fokus tentang Kebijakan Dana Desa dan Manajemen Keuangan Desa terhadap Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 99 responden. Data penelitian dikumpulkan melalui kuisioner, dan studi dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t dimaksud untuk mengetahui secara simultan dan secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Hasil penelitian berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Dana Desa dan Manajemen Keuangan Desa berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan secara parsial variabel Kebijakan Dana Desa dan Manajemen Keuangan Desa berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Kata Kunci: *Kebijakan Dana Desa, Manajemen Keuangan Desa dan Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa.*

**ANALYSIS OF THE EFFECT OF VILLAGE FUNDING POLICY AND VILLAGE
FINANCIAL MANAGEMENT ON INCREASING THE EFFECTIVENESS OF PASIE
SEUBADEH VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAM BAKONGAN
SUB-DISTRICT EAST, ACEH SELATAN DISTRICT**

SETIA MAULIDA
NPM : 1902120308

Advisor I : Zuraidah, SE, MM

Advisor II : Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the effect of Village Fund Policy and Village Financial Management on Increasing the Effectiveness of the Pasie Seubadeh Village Development Program, Bakongan Timur District, South Aceh District. The research method used is quantitative method. The object of this study is Pasie Seubadeh Village, Bakongan Timur District, South Aceh District with a focus on Village Fund Policy and Village Financial Management for Increasing the Effectiveness of Village Development Programs. The number of samples in this study were 99 respondents. Research data were collected through questionnaires and documentation studies. Testing the hypothesis using multiple linear regression analysis, F test and t test are intended to determine simultaneously and partially the effect of the independent variables on the dependent variable at the 95% confidence level ($\alpha = 0.05$). The results of the research based on simultaneous tests show that the Village Fund Policy and Village Financial Management variables have a significant effect on Increasing the Effectiveness of the Pasie Seubadeh Village Development Program, Bakongan Timur District, South Aceh Regency. While partially the Village Fund Policy and Village Financial Management variables have a significant effect on Increasing the Effectiveness of the Pasie Seubadeh Village Development Program, Bakongan Timur District, South Aceh Regency.

Keywords: Village Fund Policy, Village Financial Management and Increasing Village Development Program Effectiveness.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan yang transparan merupakan tuntutan semua pihak dalam menjalankan pemerintahan baik di pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan. Pemerintah desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangannya berarti mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat mengalokasikan dana kepada masyarakat desa, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, mampu memberikan ruang bagi untuk terlibat dalam proses pembangunan, dan pemerintahan serta adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat penting dalam tercapainya good governance di tingkat pemerintah desa.

Alokasi dana desa ke seluruh desa di Indonesia diharapkan dapat menunjang pembangunan akses jalan pedesaan, pengembangan program desa, saran dan prasarana, ekonomi masyarakat serta kebudayaan. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 bahwa dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastuktur, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ekonomi produktif, serta pelestarian lingkungan hidup.

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan

kewenangan dan sumber dana yang memadai untuk mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang menjalankan aktivitas atau tugas yang beradaptasi baik dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Namun dengan perencanaan dan belanja yang baik, lingkungan itu dapat dikendalikan. Setiap perubahan sistem memerlukan sumber daya yang besar, sikap terbuka, dan profesionalisme. Hal ini memerlukan usaha yang maksimal dari setiap lini pemerintah. Namun, dari hal-hal kecil pun bisa dilakukan untuk memperbaiki proses belanja pemerintah yang saat ini berada dalam tahap transisi dalam suatu sistem. Pengendalian belanja harus dilakukan dengan baik dan efektif karena pada dasarnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar agar diberikan kepada desa. Seperti salah satunya dana desa yang diberikan kepada seluruh desa yang berada di Kab. Aceh Selatan yang berjumlah 205.268.050.000 (kemenkeu, 2022)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan

desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, desa sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk anggaran dana desa. Dalam penggunaan dana desa, harus ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaannya

Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang sudah direncanakan, dalam prosesnya masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dengan adanya dana desa, maka pemerintah dituntut memanfaatkan dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.

Pengertian efektivitas dana desa menurut Siagian (2014:24) adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan dana desa yang dijalankan. Desa Pasie Seubadeh adalah desa di kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.598 jiwa pada tahun 2022. Merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Aceh Selatan. Laporan realisasi dana desa dari tahun 2019 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Dana Desa Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur,
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Efektivitas (%) Persentasi Realisasi
1	2019	713.829.000	710.021.728	3.807.272	99,08%
2	2020	835.577.000	821.172.834	14.404.166	98.04%
3	2021	949.151.000	940.892.6344	8.258.366	98.72%

Sumber : Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan dana desa dari tahun 2019, 2020 dan 2021 kurang efektif karena tingkat pengelolaan dana desa masih dibawah 100%. Dapat diketahui bahwa anggaran pada 2019 sebesar Rp 413.829.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 410.021.728 dan sisa anggaran dana desa sebesar Rp 3.807.272 dengan tingkat persentase 99,08%. Kemudian anggaran dana desa pada 2020 sebesar Rp 735.577.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 721.172.834 dan sisa anggaran dana desa sebesar Rp 14.404.166 dengan tingkat persentase 98,04%. Anggaran penggunaan dana desa pada 2021 sebesar Rp 649.151.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 640.892.6344 dan sisa anggaran dana desa sebesar 98.72 dengan tingkat persentase 98,72%.

Dampak dari efektifitas dana desa adalah tidak dapat terserapnya uang

masyarakat secara optimal menunjang pelaksanaan fungsi, juga mengakibatkan pembangunan Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan peningkatan kesejahteraan.

Agar penggunaan dana desa dapat dilakukan secara efektifitas maka dana desa harus senantiasa membuat perencanaan yang matang tentang kebijakan dana desa dan manajemen keuangan desa yang sesuai dengan standar biaya/harga yang berlaku, pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian yang memadai serta harus memiliki pejabat dan aparat yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

Kebijakan dana desa adalah tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. dari pengertian diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan terdiri dari tiga hal, yaitu (1) tujuan atau sasaran kebijakan, (2) aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan (3) hasil kegiatan.

Survei awal yang penulis lakukan tentang kebijakan dana desa Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan bahwa pemerintah desa sudah menetapkan kebijakan yang baik dalam pengelolaan dana desa, namun fenomena buruk tentang pengelolaan dana desa terjadi menyeluruh di negeri ini yang perlu di waspadai. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun lalu merilis ada 110 kasus penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sepanjang 2016 sampai dengan 10 Agustus 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya

rata-rata dilakukan oknum Kepala Desa. Buktinya dari 139 pelaku, 107 diantaranya adalah Kepala Desa dan pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat Desa. Rata-rata korupsi yang dilakukan atas dana desa adalah pada program-program kerja desa, terkhususnya pembangunan infrastruktur di desa (Serambinews, 2018).

Selain kebijakan dana desa, manajemen keuangan desa juga perlu diterapkan di setiap desa khususnya di desa Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Manajemen keuangan desa adalah salah satu bidang manajemen fungsional desa yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, dan pengelolaan keuangan desa yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek

Besarnya dana yang diterima mengandung kekhawatiran banyak pihak. Seperti kita ketahui bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di pedesaan, namun dikhawatirkan justru akan menjadi lahan aparat desa melakukan tindak pidana korupsi. Sekretaris daerah kabupaten Aceh selatan juga meminta kepada Camat agar terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Desa di wilayah masing-masing. Maka dari itu Kepala Desa diminta segera mempelajari manajemen dalam pengelolaan keuangan desa.

Mencermati masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Analisis Pengaruh Kebijakan Dana desa Dan Manajemen Keuangan Desa Terhadap Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan.**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah penelitian adalah

1. Seberapa besar pengaruh kebijakan dana desa terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan?
2. Seberapa besar pengaruh manajemen keuangan desa terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan?
3. Seberapa besar pengaruh kebijakan dana desa dan manajemen keuangan Desa terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dana desa terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan?
2. Untuk menganalisis pengaruh manajemen keuangan desa terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan?
3. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dana desa dan manajemen keuangan Desa terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan?

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai anggaran dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambahkan wawasan atau pengetahuan bagi penulis mengenai Anggaran Belanja
- b. Sebagai bahan masukan atau informasi serta bahan pertimbangan bagi pemerintah Aceh dan kepada satuan kerja perangkat kota/kabupaten khususnya mengenai anggaran desa.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan analisis pengaruh kebijakan dana desa dan manajemen keuangan desa terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa

2.1.1.1 Pengertian Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang telah diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Widjaja, 2017:3).

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;

Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan untuk dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

Untuk terciptanya sebuah desa harus ada beberapa unsur yang membentuk desa tersebut. Menurut Bintarto (2019:11) Ada beberapa unsur yang dapat membentuk desa sehingga dianggap keberadaan desa tersebut:

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang

- merupakan lingkungan geografi setempat.
- 2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- 3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga Desa.
- 4. Letak, yaitu pada umumnya selalu jauh dari kota atau pusat-pusat keramaian.

Setiap desa memiliki keunggulan dan potensi masing-masing dalam pembangunan dan perkembangan desa tersebut. Menurut Bintarto (2019:18) potensi desa dapat terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Potensi fisis:
 - a. Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
 - b. Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
 - c. Iklim, yang merupakan peranan penting bagi Desa agraris.
 - d. Ternak, dalam arti fungsi ternak di Desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan.
 - e. Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengelola tanah dan sebagai produsen
2. Potensi nonfisis:
 - a. Masyarakat Desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
 - b. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi sosial Desa yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif.
 - c. Aparatur atau pamong Desa yang kreatif dan berdisiplin sumber kelancaran dan tertibnya pemerintah Desa.

Efektivitas berasal dari kata Efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesai, kata efektif memiliki arti efek, akibat, hasil atau pengaruh. Oleh karena itu, efektivitas adalah keaktifan, kegunaan, kesesuaian dalam suatu kegiatan dengan sasaran yang dituju.

Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, tingkat orang yang menghasilkan *output* seperti yang diharapkan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika dapat diselesaikan

dengan perencanaan baik waktu, biaya dan kualitas

Efektivitas ditujukan untuk mencapai hasil yang terkait dengan efisiensi, meskipun ada perbedaan diantara keduanya. Istilah efektivitas atau keefektifan adalah terjemahan dari istilah “*effectifines*” yang dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia berarti sukses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki dampak (efek, pengaruh, akibat) dan dapat membawa hasil, berguna (tindakan) dan juga berarti berlaku (untuk Hukum/Peraturan). Jonathan, (2017:3).

Menurut Trianto (2017:5) Efektivitas pengelolaan anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan asli dengan target yang ditetapkan dalam APBD. Menurut Murni, (2016:6) Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Pengertian Efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang dimaksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin dicapai atau yang telah ditetapkan.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan

Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dievaluasi dengan berbagai cara dan berkaitan erat dengan efisiensi. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif.

Menurut Sofiyanto (2001:41) Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Secara umum, kriteria keberhasilan yang paling efektif di pengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah :

1. Keberhasilan Program.
2. Keberhasilan Sasaran.
3. Kepuasan terhadap Program.
4. Tingkat *Input* dan *Output*.
5. Pencapaian Tujuan secara Menyeluruh.

Secara umum, efektivitas terkait dengan efisiensi dalam mencapai tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut Gibson di dalam penelitian Dethan (2019:16) ada 2 pendekatan untuk mengevaluasi efektivitas sesuai dengan teori sistem dan tujuan. Berdasarkan pendekatan tujuan, perumusan dan pengukuran efektivitas melalui realisasi tujuan ditentukan melalui upaya kolaboratif. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya kepatuhan dengan tuntutan eksternal sebagai kriteria untuk evaluasi efektivitas. Gibson juga menyatakan bahwa konsep efektivitas organisasi harus mencerminkan (a) seluruh siklus input-proses-output, dan (b) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan.

2.1.1.3 Indikator Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan

Menurut Kurniawan (2015:109) dalam bukunya menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi (kegiatan program atau operasi misi) daripada organisasi atau sejenisnya. Makmur (2019:7-9) menjelaskan indikator efektivitas dalam berbagai kriteria efektivitas, sebagai

berikut :

1. Kualitas.
Kerja yang diukur dari persepsi masyarakat terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan Pemimpin.
2. Kuantitas
Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang di selesaikan.
3. Efektivitas
Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
4. Kepuasan Masyarakat.
Kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberi tahu, mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar, berusaha untuk terus bergerak untuk melakukan beberapa hal walau keadaan terasa semakin sulit.
5. Kinerja yang baik
Tingkat kesesuaian hasil pengukuran kerja apakah kerja itu sudah mencapai tujuan apa belum.

2.1.2 Kebijakan Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Kebijakan Dana Desa

Noverman (2018:34) menjelaskan bahwa kebijakan Dana Desa adalah tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. dari pengertian diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan terdiri dari tiga hal, yaitu (1) tujuan atau sasaran kebijakan, (2) aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan (3) hasil kegiatan.

Menurut Widjaja (2017:46) Pembangunan desa dilakukan untuk menyeimbangkan antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana, selebihnya berdasarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang terintegrasi dengan masyarakat.

Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu sebagai suatu proses, suatu program, dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat ahli berikut ini :

7. Sebagai suatu proses yang memperhatikan jalannya proses perubahan yang dihasilkan dari gaya hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, pembangunan desa lebih menekankan pada aspek-aspek perubahan, baik secara sosial maupun psikologis. Hal ini terlihat dari perkembangan standar hidup masyarakat dengan memperhatikan masalah perubahan sikap dan perubahan lain yang akan berubah menjadi penelitian dan pendidikan yang lebih baik secara sistematis.
8. Sebagai suatu metode yang mengupayakan untuk masyarakat mempunyai keterampilan. Pembangunan desa juga merupakan suatu metode untuk mencapai pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
9. Sebagai suatu program yang meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan dibidang-bidang tertentu seperti pendidikan, pertanian, kesehatan, koperasi, industri rumah tangga, perbaikan rumah dan lainnya.
10. Sebagai suatu gerakan, pada dasarnya semua gerakan atau kegiatan pembangunan diarahkan ke desa. Sebagai gerakan pembangunan desa diupayakan terwujudnya masyarakat yang sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagaimana dijelaskan diatas pembangunan desa mencakup berbagai aspek dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat desa, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, agar semua kegiatan program saling mendukung dan efektif serta efisien dan berjalan sesuai rencana, harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta desa sebagai lokasi pembangunan.

Masalah pembangunan pedesaan adalah rendahnya tingkat aset yang dikendalikan oleh masyarakat desa dan masih rendahnya akses masyarakat desa ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana perdesaan dan rendahnya

kualitas SDM di desa yang kebanyakan lembaga berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya organisasi berbasis masyarakat, koordinasi lintas sektoral yang lemah dalam pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, sasaran yang dapat dicapai dalam pembangunan desa adalah :

- a. Meningkatkan layanan pertanahan dan menangani masalah pertanahan dibawah yurisdiksi kabupaten.
- b. Memperkuat manajemen dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat.
- d. Meningkatkan prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan.
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah.
- f. Meningkatkan ekonomi regional dan menghilangkan ketidaksetaraan antar daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dana Desa

Desa harus menerapkan prinsip transparansi dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam kontek UU desa, Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dana desa mencakup 3 (tiga) tahapan penting yaitu :

1. Perencanaan pembangunan desa

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep pembangunan desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa desa harus merujuk pada perencanaan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan. Ini diatur dalam UU desa, khususnya pasal 79 dan Dalam pasal 79, UU desa menyatakan :

- 1) Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan dengan mengajukan permohonan perencanaan zonasi kabupaten/kota.
- 2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6

(enam) tahun.

- b. Rencana Pembangunan Tahunan desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- 6) Program pemerintah berskala lokal desa dikoordinasikan dan didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- 7) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Dalam UU desa, untuk memenuhi prinsip demokrasi, kemandirian kesetaraan, partisipasi, dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak hanya mengembangkan konsep *top-down* tetapi juga konsep desa membangun. Konsep desa membangun memberikan prioritas pada negosiasi desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini dijelaskan dalam Pasal 80 UU desa:

- 1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dibuat dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- 2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam persiapan perencanaan pembangunan desa.
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam menentukan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), prioritas, program, kegiatan dan

kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat desa, termasuk:

- a. Peningkatan kualitas dan akses ke pelayanan dasar.
- b. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- c. Perkembangan ekonomi pertanian yang efisien.
- d. Pengembangan dan penggunaan teknologi yang tepat untuk kemajuan ekonomi.
- e. Untuk meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan pembangunan desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang banyaknya penggunaan keuangan desa. Pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pengeluaran desa yang ditentukan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sedikitnya 70% anggaran desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Maksimal 30% dari total anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Intensif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- c. Dari Pasal ini, dapat dilihat bahwa pembiayaan desa terbatas tidak hanya untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembiayaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat tetapi juga digunakan untuk intensif bagi Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- d. Dalam menjalankan APB Desa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa atau elemen masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus memprioritaskan penggunaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam di desa dan memperkuat swadaya dan kerjasama masyarakat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- e. Selain itu, APB Desa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau disebut dengan istilah pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan pedesaan adalah kombinasi dari pengembangan

partisipatif dan pendekatan pembangunan antar-desa, yang dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan, pengembangan dan penguatan masyarakat pedesaan. Upaya pembangunan pedesaan dapat dilakukan secara bottom up dengan saran dari Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan top down yaitu program dari Gubernur atau Bupati/Walikota

Saat melakukan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa menerima bantuan secara bertahap. Secara teknis, bantuan diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, staf pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh camat di wilayah desa. Ketentuan pendamping untuk masyarakat dan pemerintah desa diatur dalam Pasal 128-131 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa.

3. Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa

Secara umum, Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 103-104 mengatur prosedur pelaporan yang harus diikuti oleh Kepala Desa. Kepala Desa harus melaporkan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun. Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa diarahkan ke Bupati/Walikota, yang disampaikan melalui Camat.

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APB Desa tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berikut ketentuan tambahan yang harus dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban tentang implementasi APB Desa:

- a. Format laporan pertanggungjawaban untuk realisasi APB Desa tahun anggaran adalah valid.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran.
- c. Format laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kepala Desa harus sepenuhnya terintegrasi, terlepas dari sumber pendanaan yang disediakan oleh desa. Ini berbeda dari peraturan sebelumnya, yang mengharuskan desa untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan dana berdasarkan sumber dananya.

Menurut Sulastri (2016:16) UU Desa menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk mengendalikan pembangunan desa (*downroad accountability*), kontrol oleh lembaga desa dan pengawasan masyarakat (*upward accountability*). Berikut ini beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan :

1. Pengawasan progresif supra desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam operasionalnya. Fungsi pengawas telah didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dikomunikasikan kepada pemerintah pusat terkait dengan unsur inspeksi. Pengawasan pembangunan desa diteruskan ke Kementerian Desa dan inspeksi negara ke Kementerian Dalam Negeri.
2. Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dimana keuangan negara yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dan APBD. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem kontrol internal pemerintah memberi wewenang kepada BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa.

3. Pasal 55 dan 88 UU Desa tentang Pengawasan kinerja Kepala Desa oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan, antara lain melalui tanggung jawab Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD.

Pengertian “Pembangunan Desa” berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

(sunardi dan rosa, 2020:279)

2.1.2.3 Indikator Kebijakan Dana Desa

Dalam kebijakan dana desa tersebut harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Indikator Pelaksanaan Kebijakan desa menurut Sulastri (2016:16) adalah :

1. Respon masyarakat terhadap pembangunan desa
Masyarakat selalu memberikan respon tentang bagaimana pembangunan desa setiap tahun melalui dana desa
2. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
Masyarakat ikut terlibat (musyarah) atas kebijakan pembangunan untuk desa
3. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.

Masyarakat diberikan gambaran dan transparansi tentang anggaran yang dikeluarkan

4. Bertanggung jawab

Semua perangkat desa ikut bertanggung jawab atas pelaporan anggaran

5. Taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan

Menjadikan undang-undang sebagai dasar atas setiap kebijakan

2.1.3 Manajemen Keuangan Desa

2.1.3.1 Pengertian Manajemen Keuangan Desa

Manajemen keuangan desa adalah salah satu bidang manajemen fungsional desa yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, dan pengelolaan keuangan desa yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek. Noverman (2018).

Alokasi Dana Desa adalah suatu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai, wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa harus dipahami. Persiapan otoritas desa adalah pelaksanaan program desentralisasi dan otonomi. Dengan desentralisasi dan otonomi desa, desa membutuhkan dana untuk menggunakan kekuasaan yang didelegasikan kepada desa.

Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang diperoleh dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah paling sedikit 10% untuk desa. Alokasi Dana Desa berasal dari formulasi DAU dengan beberapa rekomendasi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, desentralisasi, nono-diskriminasi, transparansi, kesederhanaan dan semangat

untuk mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diakui secara fundamental. Sinaga, (2018:22).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang.

Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada.

Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa maupun melalui kerja sama antara Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakann melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh bendahara desa. Kepala desa dalam melaksanakan Penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Des.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pengelolaan keuangan desa laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai dan kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

4. Pelaporan

Petunjuk teknis alokasi dana desa, bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

5. Pertanggung Jawaban

Petunjuk teknis alokasi dana desa tahun 2016 pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bentuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Keuangan Desa

Noverman (2018) menjelaskan dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemmentasi suatu kebijakan, yaitu:

2. Komunikasi
Komunikasi digunakan supaya manajer atau yang membuat kebijakan dan para implementor akan semakin baik dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
3. Sumber daya.
Dalam mengimlementasikan suatu kebijakan variabel yang paling dibutuhkan yaitu sumber daya, didalamnya umber daya finaial dan sumber daya manusia.
4. Disposisi
Disposisi adalah karekter atau watak yang dipunyai oleh implementator, seperti kejujuran, komitmen, serta sifat yang demokratis.

2.1.3.3 Indikator Manajemen Keuangan Desa

Sinaga (2018:34) menambahkan bahwa terdapat beberapa indikator Manajemen Keuangan desa yaitu :

1. Transparan

Adanya transfaransi dari setiap transaksi dana desa

2. Efisien

Penggunaan dana desa harus sangat efisien dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat dan desa

3. Bertanggung jawab

Adanya pertanggung jawaban yang baik dari semua pihak yang terlibat

4. Memperhatikan rasa keadilan

Semua masyarakat berhak merasakan atas adanya dana desa

5. Mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dana desa diberikan atas keinginan agar kepentingan masyarakat bisa segera diatasi dengan menggunakan dana desa

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Andini Winarianti (2020) yang berjudul “Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa” yang dapat disimpulkan bahwa Sebagai Pemerintah Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan untuk meningkatkan kualitas tahapan perencanaan terutama aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlu dilakukan sosialisasi oleh aparat Pemerintah Desa Pakatto kepada masyarakat terkait pengawasan pembangunan desa. Selanjutnya, proses pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakatto sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat pada setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Faktor-faktor yang menghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Pakatto yaitu: a. Pencairan Dana Desa b. Sumber Daya Manusia (SDM).

Penelitian yang dilakukan oleh Nardi Sunardi dan Rosa Lesmana (2020) yang berjudul “Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang” yang dapat diambil kesimpulan

Berdasarkan hasil “Koefisien jalur pengaruh langsung (*direct effect*) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) terhadap Manajemen Keuangan Desa (MKD) sebesar $5,144 > 1,96$, Pengaruh langsung Manajemen Keuangan Desa (MKD) terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar $4,288 > 1,96$, sedangkan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar 1.296. Dari analisis ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Keuangan Desa (MKD), dan Manajemen Keuangan Desa (MKD) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sedangkan secara tidak langsung Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Elin Dwi Sintia (2019) yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)”. Yang dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara terdaskan tinjauan Ekonomi Islam sudah cukup efektif atau cukup dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdasarkan ekonomi Islam maka dapat dikatakan baik menurut asas keadilan sebagaimana tugas manusia sebagai khilafah di muka bumi ini. dalam pengelolaan Dana Desa melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan adanya transparansi informasi serta meningkatkan sumber daya manusia guna memperbaiki sistem

peraturan yang ada di Desa Semuli Raya terutama dalam hal pembangunan Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Maijon Kinaro (2019) yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”. Dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dimana dalam proses pengelolaan dana desa ada tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian pada tahap perencanaan, dilihat dari musyawarah dusun dan musyawarah desa yang dilaksanakan desa sudah efektif, karena partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah sangat besar serta transparansi anggaran oleh pemerintah desa kepada masyarakat telah dilakukan sehingga mencapai tujuan dan mendapatkan hasil. Pada tahap pelaksanaan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam tahap ini sudah efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Juliana (2017) yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan” yang dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya hambatan yang dijumpai dalam pengelolaan dana desa, maka dampak yang diharapkan dari dana desa dalam menunjang pembangunan di pedesaan dalam jangka pendek dapat dikatakan cukup baik. Hasil kajian menunjukkan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, efektivitas pemanfaatan desa, pemerataan pendapatan masyarakat desa dan penambahan sarana dan prasarana memiliki nilai rata-rata cukup baik, tetapi masih belum memberikan dampak yang nyata terutama pemerataan pendapatan masyarakat desa.

Tabel 2.1 **Penelitian Sebelumnya**

No.	Judul, Nama Penetian (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa, Andini Winarianti (2020)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala yang digunakan adalah skala likert	Faktor-faktor yang menghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Pakatto yaitu : Pencairan Dana Desa b. Sumber Daya Manusia (SDM).	Variabel dependen Variabel independen	• Waktu, • lokasi dan • subjek penelitian.
2	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Nardi Sunardi dan Rosa Lesmana (2020)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala yang digunakan adalah skala likert	Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, perdagangan, pertukangan dan sektor informal lainnya.	Variabel dependen Variabel independen	• Waktu, • lokasi dan • subjek penelitian.
3	“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)” Elin Dwi Sintia (2019)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala yang digunakan adalah skala likert	Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif.	Variabel dependen Variabel independen	• Waktu, • lokasi dan • subjek penelitian.
4	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Maijon Kinaro (2019)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala.	Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dimana dalam proses pengelolaan dana desa ada tiga tahap yaitu.	Variabel dependen Variabel independen	• Waktu, • lokasi dan • subjek penelitian

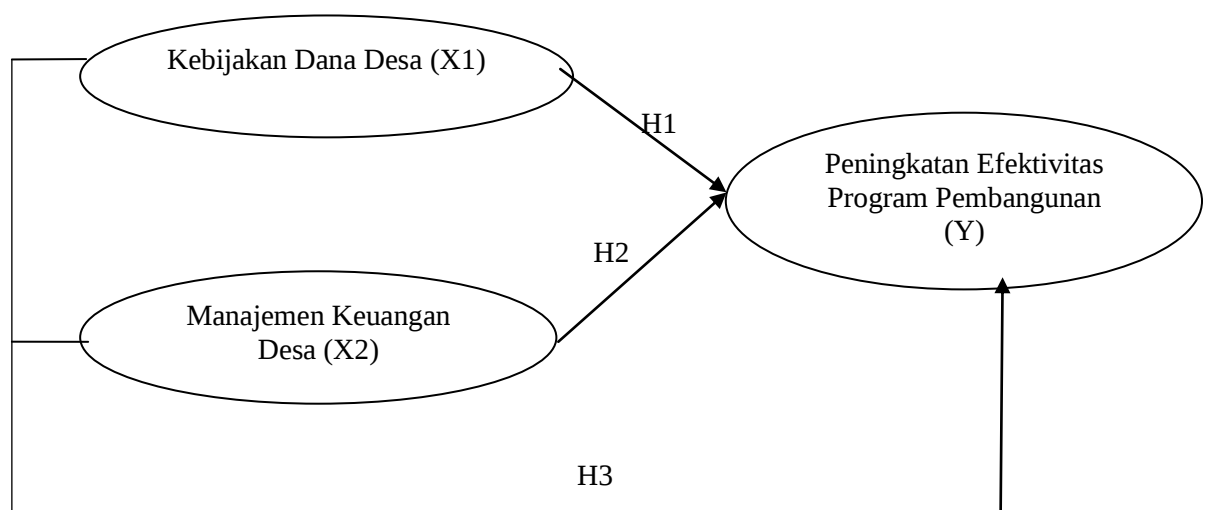
No.	Judul, Nama Penetian (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan, Endang Juliana (2017)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.	dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan. Hasil kajian menemukan adanya perbedaan	Variabel dependen Variabel independen	• Waktu, • lokasi dan • subjek penelitian..

Sumber: Data diolah, 2023

2.3 Kerangka Pemikiran

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program- program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan konsep hubungan antara variabel sebagaimana yang di tunjukkan pada Gambar 2.1



Sumber: Dikembangkan oleh penulis berdasarkan penelitian sebelumnya (Maijon Kinaro 2019)

Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan studi kepustakaan maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah:

- Ha₁ : Kebijakan dana desa berpengaruh positif terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan
- Ha₂ : Manajemen keuangan desa berpengaruh positif terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan.
- Ha₃ : kebijakan dana desa dan manajemen keuangan desa berpengaruh positif terhadap peningkatan program pembangunan Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu usulan untuk memecahkan masalah dan merupakan rencana kegiatan yang dibuat oleh peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai dengan tujuan penelitian (Arikunto, 2016:12).

3.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Sekaran, 2017:64). Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan dalam manajemen keuangan. Efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan dipengaruhi oleh kebijakan dana desa.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam kategori pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran, 2017:62). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu, pengaruh kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan

3.1.3 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan studi *cross sectional*. Studi *cross sectional* merupakan sebuah studi yang dilakukan dengan data hanya sekali dikumpulkan (Sekaran, 2017:178). Waktu penelitian ini diawali mulai tanggal 25 November 2022 sampai dengan selesai, berikut tabel proses kegiatan penelitian:

Tabel 3.1
Proses Kegiatan Penelitian

No	NamaKegiatan	Bulan			
		Nov	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan Judul Proposal				
2	Pengamatan dan Observasi				
3	Tahap Penyusunan Proposal				
4	Seminar Proposal				
5	Pengolahan Data				
6	Penyusunan Skripsi				
7	Bimbingan Skripsi				
8	Ujian Komprehensif				

Sumber : Arikunto. (2016).

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2017:73). Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan secara individu. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara menggunakan kuesioner dari personal-personal perangkat desa dan masyarakat tersebut.

Untuk mengubah data-data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner dalam bentuk data kuantitatif maka digunakan skala ukuran yaitu skala Likert. Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuesioner diberi nilai skor 1-5 dengan kategori menurut Arikunto (2016) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Likert

Kriteri	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju(TS)	2
Kurang Setuju(KS)	3
Setuju(S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber : Arikunto, 2016

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). Populasi penelitian ini adalah masyarakat dan perangkat Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan berjumlah 1.698 jiwa yang terdiri dari 805 laki laki dan 893 perempuan.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:86). Penentuan ukuran sampel ini dilakukan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2016:49) sebagai berikut:

Rumus Slovin :
$$N = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut:

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Solvin adalah antara 10-20 %:

$$N = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{1.698}{1+1.598.10\%^2}$$

$$n = \frac{1.698}{1+1.698.0,1^2}$$

$n = 94,438$ responden dan dibulatkan menjadi 95 orang/masyarakat, penulis juga menambahkan 4 responden dari perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara dan kepala badan usaha milik desa.

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh ukuran sampel (n) dalam penelitian ini sebanyak 99 orang.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Jonathan (2017:69) menjelaskan data primer merupakan sumber data yang diperoleh oleh pengumpulan data dari objek riset. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner secara langsung kepada masyarakat dan perangkat Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan. Sumber data yang diperoleh berupa pernyataan yang berkaitan dengan variabel penelitian berupa Pengaruh Kebijakan Dana desa Dan Manajemen Keuangan Desa Terhadap Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan.

2. Data Sekunder

Jonathan (2017:69) mendefinisikan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari membaca dan mempelajari melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta profil desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang penting demi keberhasilan dari penelitian yang dilakukan. Data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data pada masyarakat dan perangkat Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Kuesioner

Pengumpulan data menggunakan metode ini adalah memberikan pernyataan-pernyataan tertulis yang berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

2. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan metode ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden tentang pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian dan untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan responden adalah benar dan tidak dibuat-buat.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan metode ini adalah dengan menggunakan referensi yang berhubungan dengan penelitian. Referensi tersebut dapat berupa buku, internet, jurnal, dan lain-lain.

3.4 Definisi dan Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu masing-masing satu variabel terikat (dependen) dan satu variabel bebas (independen). Variabel dependen adalah peningkatan efektivitas program pembangunan di Desa Pasie Seubadeh Kabupaten . Aceh Selatan (Y). Sementara untuk variabel independen yaitu

kebijakan dana desa (X1) dan manajemen keuangan desa (X2). Definisi dari variabel yang digunakan. Berikut operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini:

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala	Item pertanyaan
1	Kebijakan Dana Desa (X1)	Kebijakan Dana Desa adalah tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan terdiri dari tiga hal, yaitu (1) tujuan atau sasaran kebijakan, (2) aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan (3) hasil kegiatan. Noverman (2018)	1. Respon masyarakat terhadap pembangunan desa 2. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. 3. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. 4. Bertanggung jawab 5. Taat pada ketentuan peraturan perundang	Likert	A1-A5
2	Manajemen Keuangan (X2)	Manajemen keuangan desa adalah salah satu bidang manajemen fungsional desa yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, dan pengelolaan keuangan desa yang meliputi investasi dan pendanaan. Noverman (2018)	1. Transparan 2. Efisien 3. Bertanggung jawab 4. Memperhatikan rasa keadilan 5. Mengutamakan kepentingan masyarakat setempat	Likert	B1-B5
3	Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan (Y)	Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, tingkat orang yang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika dapat diselesaikan dengan perencanaan baik waktu, biaya dan kualitas. Menurut Riyadi (dalam Mamesah, 2015)	1. Kualitas. 2. Kuantitas. 3. Efektivitas. 4. Kepuasan masyarakat. 5. Kinerja yang baik	Likert	C1-C5

Sumber : Data Sekunder 2022

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda yaitu suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel *dependen* dengan beberapa variabel independen. Tujuan analisis regresi linear berganda adalah menggunakan nilai-nilai variabel yang diketahui, untuk meramalkan nilai variabel dependen Wibowo (2017:69). Untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel, maka penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression analisis*) sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

Y : Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan

a : Konstanta

X₁ : Kebijakan Dana Desa

X₂ : Manajemen Keuangan

b₁,b₂ : Koefisien Regresi

e : Error term

3.6 Pengujian Data

Uji reliabilitas dan validitas adalah uji terhadap instrumen penelitian yang akan menyajikan data kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang bersifat kualitatif sehingga harus dapat memberikan kebenaran dan kepercayaan melalui suatu set uji kehandalan dan validitas.

3.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat ke validitas suatu instrument. Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variable yang diteliti secara nyata. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Corelation* dengan bantuan program SPSS, dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperolehkan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *Product Moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa item pertanyaan mempunyai korelasi diatas 5% atau dalam bahasa statistik terdapat konsisten internal yang berarti item-item pertanyaan tersebut dapat mengukur aspek yang sama. Ini berarti bahwa setiap data yang ditunjukkan adalah valid.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Ghozali (2016:110) menyatakan bahwa *Reliabilitas instrument* adalah tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh kuesioner, meskipun digunakan secara berulang-ulang. Pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung *Cronbach Alpha* masing-masing variabel yang terlibat. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Uji ini dimaksudkan untuk menunjukkan banyaknya variansi atau perbedaan yang diharapkan pada seperangkat pengukuran yang dilakukan secara berulangulang terhadap suatu objek. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0,60.

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data yang dijelaskan Ghozali (2016:110) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis gambar berupa plot dan uji statistic dengan melihat nilai kurtosis dan skewness.

Kenormalan data-data dapat dilihat dari tampilan gambar normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Ghozali (2016:110) Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas Ghozali (2016:91) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Bila ternyata dalam model regresi terdapat multikolinearitas, maka harus menghilangkan variabel independent yang mempunyai korelasi tinggi. Ghozali (2014:91) juga menambahkan jika korelasi antar variabel independent tinggi yaitu di atas 0,90 maka terdapat multikolinearitas. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 10% dan nilai VIF lebih besar dari 10 berarti ada multikolinearitas.

3.7.3 Uji Heterokedastisitas

Muh (2014:160) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED dengan dasar analisis (1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; (2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara serentak dengan menggunakan uji F (F-test) dan secara parsial dengan menggunakan uji t (t-test) pada tingkat keyakinan (confidence interval) 95% dengan kriteria Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan :

3.8.1 Uji T (Parsial)

Digunakan untuk menguji tingkat signifikan variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat (Y) yaitu pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, Dengan kriteria pengujian :

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka menerima H_a dan menolak H_o

Jika $t_{tabel} < t_{hitung}$, maka menolak H_a dan menerima H_o

Ho1 : Kebijakan tidak berpengaruh terhadap Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan

Ha1 : Kebijakan berpengaruh terhadap Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan

Ho2 : Manajemen Keuangan tidak berpengaruh terhadap Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan

Ha2 : Manajemen Keuangan berpengaruh terhadap Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan

3.8.2 Uji F (Simultan)

Digunakan untuk menguji tingkat signifikan seluruh variabel bebas (X1 dan X2,) terhadap variabel terikat (Y). Kriteria Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan pada tingkat signifikansi 5% adalah :

Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka menerima Ha dan menolak Ho

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka menolak Ha dan menerima Ho

Ho3 : Kebijakan dan Manajemen Keuangan tidak berpengaruh terhadap Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan

Ha3 : Kebijakan dan Manajemen Keuangan berpengaruh terhadap Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan

Gambaran umum Desa Pasie Seubadeh adalah usaha menggambarkan secara utuh tentang kondisi desa. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum desa ini, kemudian diperkaya dengan data-data yang didapat dari hasil survei, wawancara, diskusi terarah dan terbatas maupun pengamatan secara langsung merupakan bagian dari tahapan rencana kegiatan masyarakat. Kemudian Desa Pasie Seubadeh mempunyai visi yaitu “memperkuat persatuan dan kesatuan Desa menuju Pasie Seubadeh yang mandiri, sejahtera dan bersyariat Islam”.

Desa Pasie Seubadeh adalah salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Mengenai sejarah pembangunan Desa Pasie Seubadeh ini berdiri beberapa puluh tahun yang lalu dimana juga masih menurut sejarah dan peristiwa- peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat Pasie Seubadeh tempo dulu. Secara historis, dahulu sebagian besar penduduk Desa Pasie Seubadeh berasal dari wilayah Pasie Seubadeh yang dahulu terdiri dari kerajaan sibadeh, ringkasan sejarah keurajeun seubadeh sejarah meurah bacan atau teuku chiek pho na le berasal dari kerajaan Perlak I merupakan cucu dari seorang Sultan Perlak I Sulthan Makhdum Malek Muhammad Amin Syah I Johan Berdaulat atau Meurah Muhammad Amin Syah beliau

Mempunyai 2 orang putra. Penduduk Desa Pasie Seubadehyang secara adat istiadat memiliki satu kesatuan dan terangkum di dalam Desa Gajah yang terdiri dari tiga dusun yaitu Kuala Cangkui, Keude dan Kuta Baro. Struktur organisasi Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan



Sumber: Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan
(2023)

4.2 Karakteristik Responden

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pendapatan rata-rata perbulan yang terlihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase(%)
1.	Jenis Kelamin		
	▪ Pria	56	56,6
	▪ Wanita	43	43,4
	Jumlah	99	100,0
2	Usia		
	▪ < 25 tahun	26	26,3
	▪ 26-35 tahun	15	15,2
	▪ 36-45 tahun	24	24,2
	▪ > 45 tahun	34	34,3
	Jumlah	99	100,0
3.	Pendidikan		
	▪ SMA	37	37,4
	▪ Diploma	14	14,1
	▪ Sarjana	44	44,4
	▪ Pascasarjana	4	4,0
	Jumlah	99	100,0
4	Penghasilan rata-rata perbulan		
	▪ < Rp 1000.000	12	12,1
	▪ Rp 2.000.000- Rp 3.000.000	31	31,3
	▪ Rp 4.000.000- Rp 5.000.000	27	27,3
	▪ > Rp. 6.000.000	29	29,3
	Jumlah	99	100,0

Sumber: Data Primer, 2023 (Diolah)

Dari Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria adalah 56 responden atau 56,6%, dan berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 43 responden atau 43,4%.

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berusia dibawah 25 tahun sebanyak 26 responden atau 26,3%, yang berusia antara 26 sampai dengan 35 tahun yaitu sebanyak 15 responden atau 15,2%, yang berusia antara 36 sampai dengan 45 tahun yaitu sebanyak 24 responden atau 24,2% dan yang berusia 56 tahun ke atas sebanyak 34 responden atau 34,3%.

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan responden dapat dijelaskan bahwa sebanyak 37 responden atau 37,4% berpendidikan terakhir SMA, sebanyak 14 responden atau 14,1% berpendidikan terakhir diploma, sebanyak 44 responden atau 44,4% berpendidikan terakhir sarjana dan sebanyak 4 responden atau 4% berpendidikan terakhir pasca sarjana.

Berdasarkan karakteristik responden dengan penghasilan rata-rata perbulan dapat dijelaskan bahwa sebanyak 12 responden atau 12,1% dengan penghasilan dibawah Rp 1.000.000, sebanyak 31 responden atau 31,3% dengan penghasilan antara Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000, sebanyak 27 responden atau 27,3% dengan penghasilan antara Rp 4.000.000 – Rp 5.000.000 dan yang berpenghasilan rata-rata di atas Rp. 6.000.000 sebanyak 29 responden atau 29,3%.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Uji Validitas Instrumen

Berdasarkan output komputer seluruh pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikansi dibawah 5 % sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi product moment dimana hasilnya menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi di atas nilai kritis 5 % yaitu di atas 0,202. Ini berarti data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Untuk mengetahui nilai validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

No pertanyaan		Variabel	Koefisien korelasi	Nilai kritis 5 % (N=99)	Ket
1	A1	Y	0,645	0,202	Valid
2	A2		0,682	0,202	Valid
3	A3		0,611	0,202	Valid
4	A4		0,413	0,202	Valid
5	A5		0,550	0,202	Valid
6	B1	X ₁	0,573	0,202	Valid
7	B2		0,492	0,202	Valid
8	B3		0,497	0,202	Valid
9	B4		0,423	0,202	Valid
10	B5		0,374	0,202	Valid
11	C1	X ₂	0,436	0,202	Valid
12	C2		0,701	0,202	Valid
13	C3		0,595	0,202	Valid
14	C4		0,660	0,202	Valid
15	C5		0,670	0,202	Valid

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan semuanya valid, karena mempunyai koefisien korelasi di atas dari nilai kritis korelasi *product moment* yaitu sebesar 0,202 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan internal consistency atau derajat ketepatan jawaban. Untuk pengujian ini digunakan *Statistical Packaged for Social Sciences* (SPSS). Setelah melakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui

konsistensi hasil sebuah jawaban tentang tanggapan responden. Untuk melakukan pengujian reliabilitas penulis menggunakan program SPSS versi 22. Reliabilitas yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik, dan apabila lebih besar dari 0,6 dan mendekati angka 1 berarti reliabilitas instrumen adalah baik.

Tabel 4.3
Uji Reliabilitas variabel penelitian (Alpha)

No	Variabel	Item Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Kehandalan
1.	Peningkatan efektivitas program pembangunan (Y)	5	0,770	Handal
2.	Kebijakan dana desa (X1)	5	0,795	Handal
3.	Manajemen keuangan desa (X2)	5	0,703	Handal

Sumber : data diolah, 2023

Hasil uji Reliabilitas dapat dilihat dari nilai *cronbach Alpha*, nilai *cronbach alpa* reliabilitas yang baik adalah yang makin mendekati 1. “Reliabilitas yang kurang dari 0,60 adalah kurang baik, sedangkan lebih dari 0,60 dapat diterima dan reliabilitas dengan *cronbach alpha* 0,80 atau diatasnya adalah baik”.

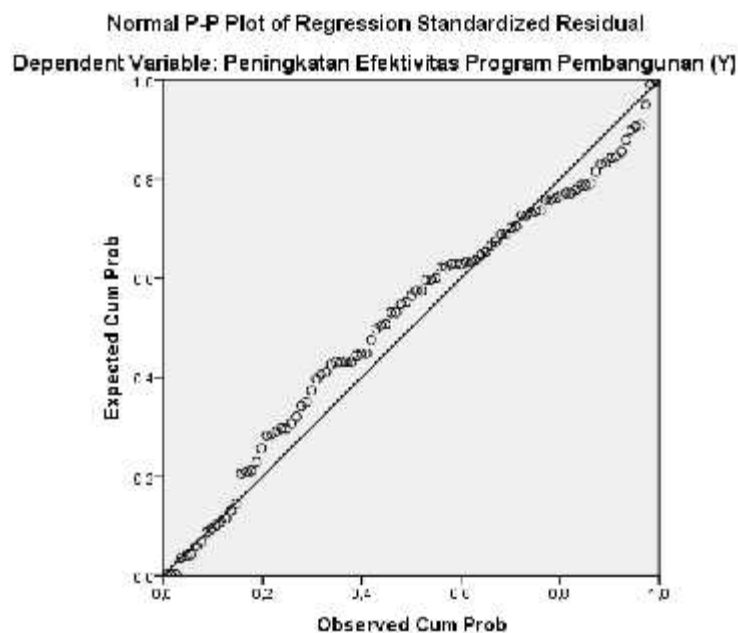
Dari hasil pengujian reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa reliabilitas variabel Peningkatan efektivitas program pembangunan berdasarkan pengujian reliabilitas dari instrumen, diketahui bahwa hasil pengujian variabel Peningkatan efektivitas program pembangunan, Kebijakan dana desa dan Manajemen keuangan desa seluruhnya adalah reliabel karena melebihi dari 0,60.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Untuk pengujian normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui Analisis Grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Data yang normal ditandai dengan sebaran titik-titik data diseperti garis diagonal. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.2 tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan menunjukkan indikasi normal. Analisis dari grafik diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. “Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi-asumsi normalitas”. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi Peningkatan efektivitas program pembangunan berdasarkan masukan variabel independen.

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Pada model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.4:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Toleransi	VIF	Keterangan
Kebijakan dana desa	,833	1,201	Non Multikolinieritas
Manajemen keuangan desa	,833	1,201	Non Multikolinieritas

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 maka dapat menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai Tolerance yang kurang dari 0,10 berarti tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa

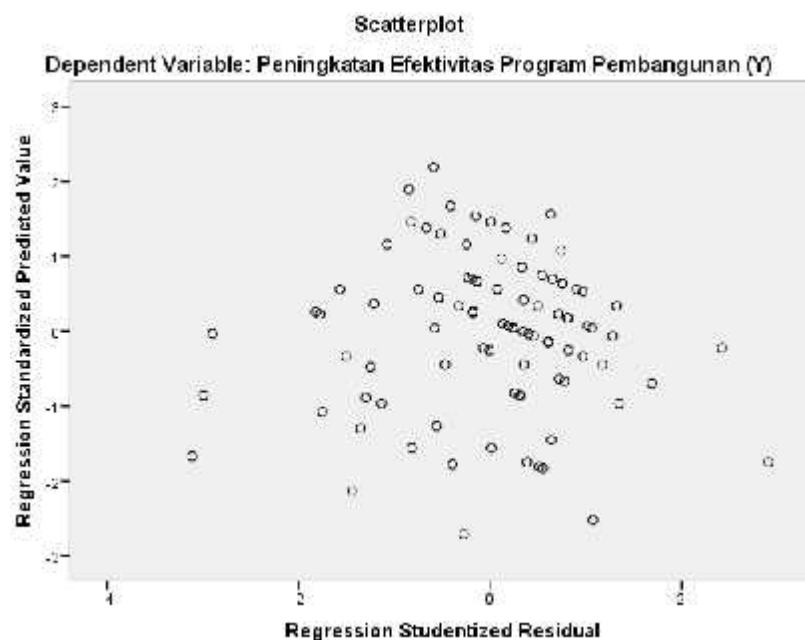
tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

4.3.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan mengamati pola yang terdapat pada Scatterplot, dimana hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.3:

Gambar 4.3

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Dari Gambar 4.3 uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Deskriptif

Penelitian ini mengamati dua variabel bebas (*independent variabel*) yaitu variabel Kebijakan dana desa (X_1) dan variabel Manajemen keuangan desa (X_2) dan juga mengamati satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu variabel Y, Peningkatan efektivitas program pembangunan.

4.4.1 Variabel Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai variabel Peningkatan efektivitas program pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Saya sangat merasakan Kualitas Pembangunan di Desa	-	-	5	5,1	20	20,2	47	47,5	27	27,2	3,97
2	Kuantitas Pembangunan desa sangat dirasakan oleh masyarakat	-	-	4	4,0	19	19,2	57	57,6	19	19,2	3,92

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
3	Efektivitas pembangunan desa seperti yang telah di rencanakan	-	-	3	3,0	22	22,2	50	50,5	24	24,2	3,96
4	Saya merasa puas dengan Pembangunan di desa	-	-	4	4,0	19	19,2	53	53,5	23	23,2	3,96
5	Kinerja pembangunan desa pasie seubadeh aceh selatan sangat memuaskan	3	3,0	5	5,1	17	17,2	58	58,6	16	16,2	3,80
Rerata												3,92

Sumber : Data di olah 2023

Berdasarkan 4.5 di atas dapat dijelaskan bahwa responden sangat merasakan Kualitas Pembangunan di desa responden dengan nilai rata-rata sebanyak 3,97. Kuantitas Pembangunan desa sangat dirasakan oleh masyarakat dengan nilai rata-rata sebanyak 3,92. Efektivitas pembangunan desa seperti yang telah di rencanakan dengan nilai rata-rata sebanyak 3,96. Responden merasa puas dengan Pembangunan di desa dengan nilai rata-rata sebanyak 3,96. Kinerja pembangunan desa pasie seubadeh aceh selatan sangat memuaskan dengan nilai rata-rata sebanyak 3,80. Dapat disimpulkan bahwa variabel Peningkatan efektivitas program pembangunan mempunyai nilai rerata sebesar 3,92 artinya rata-rata responden menyatakan setuju

dengan semua pernyataan yang ada pada kuisioner untuk variabel peningkatan efektivitas program pembangunan.

4.4.2 Variabel Kebijakan Dana Desa

Penjelasan responden tentang variabel kebijakan dana desa dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kebijakan Dana Desa

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Masyarakat sangat peduli terhadap pembangunan desa	0	0	4	4,0	19	19,2	53	53,5	23	23,2	3,96
2	Setiap anggaran yang diterima desa selalu melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan pembangunan desa	0	0	4	4,0	23	23,2	50	50,5	22	22,2	3,91
3	Aparatur desa selalu transparasi kepada masyarakat dalam hal anggaran	0	0	4	4,0	16	16,2	48	48,5	31	31,3	4,07
4	Aparatur desa selalu bertanggung jawab atas segala kebijakan yang di buat	0	0	3	3,0	14	14,1	56	56,6	26	26,3	4,06

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
5	Setiap pelaksanaan pembangunan aparatur desa selalu berpedoman pada aturan yang berlaku	0	0	2	2,0	21	21,2	51	51,5	25	25,3	4,00
Rerata												4,00

Sumber : Data di olah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa Masyarakat sangat peduli terhadap pembangunan desa dengan nilai rata-rata sebanyak 3,96. Setiap anggaran yang diterima desa selalu melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan pembangunan desa dengan nilai rata-rata sebanyak 3,91. Aparatur desa selalu transparasi kepada masyarakat dalam hal anggaran dengan nilai rata-rata sebanyak 4,07. Aparatur desa selalu bertanggung jawab atas segala kebijakan yang di buat dengan nilai rata-rata sebanyak 4,06. Setiap pelaksanaan pembangunan aparatur desa selalu berpedoman pada aturan yang berlaku dengan nilai rata-rata sebanyak 4,00. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan dana desa responden mempunyai nilai rerata sebesar 4,00 artinya rata-rata responden menyatakan setuju dengan semua pernyataan yang ada pada kuisisioner untuk variabel kebijakan dana desa.

4.4.3 Variabel Manajemen Keuangan Desa

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai manajemen keuangan desa dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Manajemen Keuangan Desa

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Manajemen keuangan desa selalu transparan atas setiap transaksi	2	,0	6	6,1	26	26,3	45	45,5	20	20,2	3,76
2	Pengelolaan dana desa sangat efisien	0	0	7	7,1	19	19,2	55	55,6	18	18,2	3,85
3	Kepala desa dapat mempertanggung jawabkan setiap pengeluaran dana desa	0	0	6	6,1	13	13,1	55	55,6	25	25,3	4,00
4	Kepala desa sangat memperhatikan keadilan bagi masyarakat nya	0	0	5	5,1	20	20,2	47	47,5	27	27,3	3,97
5	Dalam hal keuangan untuk pembangunan kepala desa sangat mengutamakan kepentingan masyarakat	0	0	4	4,0	19	19,2	57	57,6	19	19,2	3,92
Rerata												3,90

Sumber : Data di olah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa Manajemen keuangan desa selalu transparan atas setiap transaksi dengan nilai rata-rata sebanyak 3,76. Pengelolaan dana desa sangat efisien dengan nilai rata-rata sebanyak 3,85. Kepala desa dapat mempertanggung jawabkan setiap pengeluaran dana desa dengan nilai rata-rata sebanyak 4,00. Kepala desa sangat memperhatikan keadilan bagi masyarakat nya dengan nilai rata-rata sebanyak 3,97 dan dalam hal keuangan untuk pembangunan kepala desa sangat mengutamakan kepentingan masyarakat dengan nilai rata-rata sebesar 3,92. Dapat disimpulkan bahwa variabel Manajemen keuangan desa responden mempunyai nilai rerata sebesar 3,90 artinya rata-rata responden menyatakan kurang setuju dengan semua pernyataan yang ada pada kuisioner untuk variabel manajemen keuangan desa.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengujian Hipotesis

Hipotesis menyatakan bahwa kebijakan dana desa (X_1) dan manajemen keuangan desa (X_2). Sebagai variabel yang berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan. Hasil pengujian yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut adalah:

Tabel 4.8
Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Peningkatan Efektivitas Program
Pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan

Nama variabel	B	Std Error	t_{hitung}	t_{Tabel}	Sig.
Konstanta	0,957	0,218	0,915	1,985	0,362
Kebijakan dana desa (X ₁)	0,254	0,053	4,821	1,985	0,000
Manajemen keuangan desa (X ₂)	0,694	0,047	14,638	1,985	0,000

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan hasil output komputer melalui program SPSS seperti terlihat Tabel 4.8 di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut,

$$Y = 0,957 + 0,254X_1 + 0,694X_2$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat diketahui adalah sebagai berikut:

1) Koefisien Regresi (β)

- a. Dalam penelitian nilai konstanta adalah 0,957 artinya bila mana kebijakan dana desa (X₁) dan manajemen keuangan desa (X₂), dianggap konstan, maka peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan, adalah sebesar 0,957 pada satuan skala likert
- b. Koefisien regresi Kebijakan dana desa (X₁) sebesar 0,254. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel kebijakan dana desa secara relatif akan meningkatkan peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan sebesar

25,4% dengan asumsi variabel Manajemen keuangan desa (X_2) dianggap konstan.

- c. Koefisien regresi Manajemen keuangan desa (X_2) sebesar 0,694. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel manajemen keuangan desa akan meningkatkan peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan sebesar 69,4% dengan asumsi variabel Kebijakan dana desa (X_1) dianggap konstan.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa dari kedua variabel independen yang diteliti ternyata variabel manajemen keuangan desa mempunyai pengaruh dominan dalam meningkatkan peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan karena diperoleh koefisien regresi sebesar 69,4%.

2) Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,887 ^a	0,787	0,783	,24418

- a. Predictors: (Constant), Manajemen keuangan desa (X₂), Kebijakan dana desa (X₁)

Dari Tabel 4.9 di atas maka diperoleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,887 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 88,7%. Artinya faktor kebijakan dana desa (X₁) dan manajemen keuangan desa (X₂) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan.

Sementara itu koefisien determinasi (R²) yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,783 artinya bahwa sebesar 78,3% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam faktor kebijakan dana desa (X₁) dan manajemen keuangan desa (X₂). Sedangkan selebihnya sebesar 21,7% (100%-78,3%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dua variabel seperti kompetensi, sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan dana desa.

4.5.2. Uji Parsial (uji t)

Untuk menguji pengaruh kebijakan dana desa dan manajemen keuangan desa terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan secara parsial, digunakan uji Statistik t (uji t). Apabila nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{Tabel} , maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya apabila nilai $t_{hitung} <$ nilai t_{Tabel} , maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.8. Dapat ketahui besarnya nilai t_{hitung} dari setiap variable independen dalam penelitian ini. Nilai t_{hitung} dari setiap variabel independen akan dibandingkan dengan nilai t_{Tabel} dengan menggunakan tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau $\alpha = 0,05$.

1. Variabel Kebijakan dana desa (X_1)

Pengaruh kebijakan dana desa (X_1) terhadap variabel peningkatan efektivitas program pembangunan (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.8 nilai t_{hitung} (4,821) lebih besar dari t_{tabel} (1,985), maka keputusannya adalah menerima H_{a1} dan menolak H_{01} . Dari hasil uji signifikansi secara parsial bahwa Kebijakan dana desa berpengaruh dan signifikan terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan, artinya kebijakan tentang variabel kebijakan dana desa mempengaruhi peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan.

2. Pengaruh Manajemen keuangan desa (X_2)

Pengaruh manajemen keuangan desa (X_2) terhadap variabel

peningkatan efektivitas program pembangunan (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.8 nilai t_{hitung} sebesar 14,638 dan nilai signifikansi 0,044 sedangkan nilai t_{tabel} pada tingkat kepercayaan 0,05 adalah 1,985. oleh karena t_{hitung} (14,638) lebih besar dari t_{Tabel} (1,985) maka H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan desa berpengaruh dan signifikan terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan, artinya manajemen keuangan desa berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan.

4.5.3. Uji Simultan (uji F)

Untuk menguji pengaruh kebijakan dana desa dan manajemen keuangan desa secara serempak terhadap Peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan di gunakan uji Statistik F (uji F). Apabila nilai $F_{hitung} >$ nilai F_{tabel} , maka H_o ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya apabila nilai $F_{hitung} <$ nilai F_{table} , maka H_o diterima dan H_a ditolak. Hasil uji secara bersama-sama dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Annova

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F_{hitung}	F_{Tabel}	Sig
Regresion	21,142	2	10,571	177,299	3,091	0,000 ^a
Residuan	5,724	96	0,060			
Total	26,865	98				

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 177,299 dengan signifikansi 0,009, sedangkan F_{table} pada tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau $\alpha = 0,05$ adalah 3,091. Dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{table} , maka $F_{hitung} (177,299) > F_{table} (3,091)$. Keputusannya adalah H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima, artinya secara serempak variabel kebijakan dana desa (X_1) dan manajemen keuangan desa (X_2) berpengaruh sangat nyata (*high significant*) terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan

4.5.4. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan dana desa dan manajemen keuangan desa berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan. Artinya penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Elin Dwi sintia (2019) karena variabel independen yang diteliti sama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu peningkatan efektivitas program pembangunan. Implikasi dalam penelitian ini bahwa percepatan penyerapan anggaran dan peningkatan efektivitas program pembangunan sudah seharusnya menjadi agenda utama pemerintahan desa. Mengingat, semakin cepat anggaran terpakai dan efektif maka kegiatan ekonomi akan semakin cepat berjalan. Namun kualitas, transparansi dan manajemen keuangan dari belanja tersebut tetap menjadi prinsip yang harus dikedepankan. Jangan sampai belanja-belanja yang terjadi justru hanya bersifat konsumtif belaka tanpa memberikan efek besar bagi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan asli dan

anggaran diharapkan mampu memberikan masukan yang positif bagi perkembangan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan asli dan anggaran Desa Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan desa Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan.
2. Manajemen keuangan desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan desa Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan.
3. Kebijakan dana desa dan manajemen keuangan desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan desa Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan aparatur Desa Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan agar dapat meningkatkan meningkatkan kemampuan kerjanya dalam peningkatan program pembangunan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah atau peraturan yang berlaku.

2. Pihak masyarakat Desa Pasie Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan agar dapat ikut selalu rapat yang diadakan oleh aparatur dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dan tetap memberi dukungan kepada aparatur dalam meningkatkan pembangunan desa.
3. Untuk penelitian selanjutnya supaya tidak hanya meneliti variabel kebijakan dana desa, manajemen keuangan desa dan peningkatan efektivitas program pembangunan, tapi juga tentang variabel lainnya seperti pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur dan kemampuan aparatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rahum. (2015) “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”. *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 3 No. 4.
- Andini Winarianti. 2020. Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Arikunto. (2016). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aziz, Nyimas & Latifah L. (2016). *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2). Jakarta: Peneliti Pusat Penelitian Politik,
- Bintarto, R. (2019). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Desa Jambu, Mlonggo, Jepara. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(1), 28-41.
- Dethan. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15-19.
- Dwi, Elin, Sintia. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung
- Erlina. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen*. Medan: USU Press.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gibson, I. D. (2019). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (di akses 28/10/2021)
- Jonathan, Gary. (2017) “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*
- Juliana, Endang. (2017). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang
- Kinaro, Maijon. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam

Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Kurniawan. (2015). *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis: Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Makmur, (2019). Proses Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. *Jurnal Profit* ,

Mamesah, F. Y. (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tomposo). *Jurnal Politico*, 2.

Murni, (2016), *Ekonomika Makro*, Jakarta, PT. Refika Aditama.

Noverman, Y. (2018). "Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*

Noviyanti, Gamaputra, G., Lestari, Y., & Utami, D. A. (2018). Pengidentifikasian Pendapatan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 3, Nomor 2, 112-121*. Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan. *Skripsi*. Program Studi

Sekaran. (2017). *Metode Riset*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Sofiyanto, Moh, Ronny Malavia Mardani dan M. Agus Salim. (2017). Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *e-Jurnal Riset Manajemen*. Universitas Islam Malang.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulastrri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Halu Oleo.

Sumianto, La. (2018). Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 3 No.*

2 Bulan september 2018 P-ISSN:2502-2539. Universitas Muhammadiyah Buton

Sunardi, Nardi & Rosa Lesmana. (2020). “Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang”. *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)* Vol.3, No.3, Mei 2020 Halaman : 277 – 288. Unversitas Pamulang.

Supranto, J. (2010). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: UI Press.

Trianto (2017) *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang*

Umar, Husein. (2016) *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*, Jakarta: Ghalia Indonesia Universitas Diponegoro. Vol. 2, No. 2, 2017.

Volume 13 No. 1.

Widjaja H.A.W. (2017). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yulita, Rahma. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Imdragiri Hulu. *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2. Universitas Riau.

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA DAN MANAJEMEN KEUANGAN DESA TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA PASIE SEUBADEH KECAMATAN BAKONGAN TIMUR, KABUPATEN ACEH SELATAN

Identitas Responden

1. No. Kuesioner : (diisi oleh peneliti)
2. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
3. Usia : ☐ $\leq$ 25 Tahun ☐ 36-45 Tahun
☐ 26-35 Tahun ☐ $\geq$ 45 Tahun
4. Pendidikan : ☐ SMU/SMA ☐ Sarjana
☐ Diploma ☐ Pascasarjana
4. Penghasilan : ☐ < Rp 1000.000 ☐ Rp 4.000.000- Rp 5.000.000
☐ Rp 2.000.000- Rp 3.000.00 ☐ > Rp. 6.000.000

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* ($\checkmark$) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dengan kategori jawaban SS = Sangat Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju, S = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju

A. Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan (Y)

NO	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya sangat merasakan Kualitas Pembangunan di Desa					
2	Kuantitas Pembangunan desa sangat dirasakan oleh masyarakat					
3	Efektivitas pembangunan desa seperti yang telah di rencanakan					
4	Saya merasa puas dengan Pembangunan di desa					
5	Kinerja pembangunan desa pasie seubadeh aceh selatan sangat memuaskan					

B. Kebijakan Dana Desa (X₁)

NO	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Masyarakat sangat peduli terhadap pembangunan desa					
2	Setiap anggaran yang diterima desa selalu melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan pembangunan desa					
3	Aparatur desa selalu transparasi kepada masyarakat dalam hal anggaran					
4	Aparatur desa selalu bertanggung jawab atas segala kebijakan yang di buat					
5	Setiap pelaksanaan pembangunan aparatur desa selalu berpedoman pada aturan yang berlaku					

C. Manajemen Keuangan Desa (X₂)

NO	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Manajemen keuangan desa selalu transfaran atas setiap transaksi					
2	Pengelolaan dana desa sangat efisien					
3	Kepala desa dapat mempertanggung jawabkan setiap pengeluaran dana desa					
4	Kepala desa sangat memperhatikan keadilan bagi masyarakat nya					
5	Dalam hal keuangan untuk pembangunan kepala desa sangat mengutamakan kepentingan masyarakat					

Lampiran 2 Data Kuesioner

NO	Identitas Responden				Indikator					Y	Indikator					X1	Indikator					X2
	IR1	IR2	IR3	IR4	A1	A2	A3	A4	A5		B1	B2	B3	B4	B5		D1	D2	D3	D4	D5	
1	1	1	1	1	3	3	3	5	2	3,2	5	2	4	5	5	4,2	3	2	2	3	3	2,6
2	2	3	3	4	2	2	2	4	3	2,6	4	2	5	5	5	4,2	2	3	3	2	2	2,4
3	2	4	4	2	3	4	4	4	4	3,8	4	3	4	4	4	3,8	3	2	2	3	4	2,8
4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3,2	3	3	4	4	5	3,8	3	3	2	3	3	2,8
5	2	4	1	3	3	3	3	4	4	3,4	4	4	3	4	4	3,8	4	2	3	3	3	3
6	2	1	2	2	3	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4,8	3	4	4	3	4	3,6
7	1	2	3	3	4	5	5	2	4	4	2	2	3	4	4	3	3	4	3	4	5	3,8
8	2	1	1	3	5	5	5	2	4	4,2	2	3	4	5	3	3,4	4	4	5	5	5	4,6
9	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3,8
10	1	1	1	2	4	4	5	4	1	3,6	4	4	4	4	4	4	1	4	5	4	4	3,6
11	1	4	1	3	4	4	4	4	1	3,4	4	4	5	5	3	4,2	2	4	4	4	4	3,6
12	2	4	1	3	3	4	4	4	4	3,8	4	3	3	5	4	3,8	4	4	4	3	4	3,8
13	1	2	2	3	4	4	4	4	3	3,8	4	4	5	5	4	4,4	4	4	4	4	4	4
14	2	4	3	2	3	3	3	3	4	3,2	3	3	3	3	4	3,2	4	4	4	3	3	3,6
15	1	4	4	2	5	4	4	4	4	4,2	4	4	3	4	4	3,8	3	4	4	5	4	4
16	2	3	3	2	4	4	4	3	3	3,6	3	4	4	4	4	3,8	2	3	4	4	4	3,4
17	2	4	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4,2	2	4	4	4	4	3,6
18	1	2	1	3	4	4	4	5	4	4,2	5	4	5	4	4	4,4	3	4	4	4	4	3,8
19	1	2	2	4	4	4	4	3	4	3,8	3	3	4	4	5	3,8	4	4	4	4	4	4
20	2	4	4	2	5	4	4	5	4	4,4	5	5	4	4	4	4,4	3	5	5	5	4	4,4
21	1	3	1	2	5	4	4	5	1	3,8	5	4	4	4	4	4,2	3	5	4	5	4	4,2
22	1	2	1	4	5	3	5	5	4	4,4	5	5	4	4	4	4,4	4	3	3	5	3	3,6
23	1	4	1	2	4	3	4	4	4	3,8	4	4	5	4	4	4,2	3	4	3	4	3	3,4
24	2	4	3	3	4	4	4	4	2	3,6	4	4	5	4	5	4,4	1	3	4	4	4	3,2
25	2	3	2	4	5	3	4	3	5	4	3	4	5	3	4	3,8	4	5	4	5	3	4,2
26	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,8	4	4	4	4	4	4
27	2	2	3	3	5	5	5	3	3	4,2	3	4	3	4	3	3,4	3	4	5	5	5	4,4
28	2	3	3	3	5	5	4	4	4	4,4	4	4	5	3	5	4,2	3	4	5	5	5	4,4
29	2	4	1	2	3	3	3	3	4	3,2	3	3	4	4	4	3,6	4	3	2	3	3	3
30	1	4	1	4	3	3	3	3	2	2,8	3	3	5	5	3	3,8	3	4	4	3	3	3,4
31	1	3	3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	4,4	3	4	4	4	4	3,8
32	2	2	1	4	5	4	4	4	4	4,2	4	4	3	3	4	3,6	4	4	4	5	4	4,2
33	2	1	1	2	4	4	3	4	3	3,6	4	4	3	3	5	3,8	2	3	4	4	4	3,4
34	1	4	1	2	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4,2
35	1	4	1	1	5	5	4	5	4	4,6	5	5	5	4	4	4,6	5	3	5	5	5	4,6
36	2	4	1	2	4	5	5	4	4	4,4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4,4
37	2	2	3	3	5	4	4	4	4	4,2	4	4	5	4	5	4,4	4	4	4	5	4	4,2
38	1	1	1	1	4	4	4	5	4	4,2	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
39	1	3	3	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4,2	4	4	4	4	5	4,2
40	1	2	1	3	4	4	5	5	3	4,2	5	5	5	4	4	4,6	3	4	4	4	4	3,8
41	2	4	1	2	5	5	5	5	4	4,8	5	4	4	4	5	4,4	5	5	4	5	5	4,8
42	1	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4,2	4	4	4	4	4	4
43	2	3	2	4	4	5	4	4	4	4,2	4	4	4	4	5	4,2	4	5	5	4	5	4,6
44	1	4	1	1	4	4	5	4	4	4,2	4	4	5	5	4	4,4	4	4	5	4	4	4,2
45	1	4	3	2	4	4	4	3	3	3,6	3	3	4	4	4	3,6	5	4	4	4	4	4,2
46	2	4	1	2	5	4	5	4	4	4,4	4	4	4	5	4	4,2	5	5	5	5	4	4,8
47	1	3	1	3	5	4	4	5	4	4,4	5	4	4	4	4	4,2	4	4	5	5	4	4,4
48	2	4	1	4	5	4	4	5	3	4,2	5	4	4	4	4	4,2	4	4	4	5	4	4,2
49	1	1	3	3	4	5	4	5	5	4,6	5	5	5	4	4	4,6	3	5	5	4	5	4,4
50	1	1	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4,2	3	4	4	4	4	3,8
51	2	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4,2	4	4	4	4	4	4
52	1	3	1	4	4	4	4	4	5	4,2	4	5	4	5	5	4,6	3	4	4	4	4	3,8

53	1	2	2	2	4	4	4	5	5	4,4	5	4	4	4	4	4,2	5	4	4	4	4	4,2
54	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3,8
55	2	3	3	2	5	5	5	5	2	4,4	5	5	4	4	3	4,2	3	5	5	5	5	4,6
56	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,8	4	4	4	4	4	4
57	1	4	3	3	4	3	3	4	4	3,6	4	5	4	4	4	4,2	4	4	5	4	3	4
58	2	1	2	2	3	3	3	3	4	3,2	3	3	5	5	2	3,6	4	3	3	3	3	3,2
59	1	4	3	1	4	4	3	4	4	3,8	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3,6
60	1	4	2	4	3	3	4	4	5	3,8	4	4	4	3	3	3,6	4	3	4	3	3	3,4
61	1	4	3	2	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3,4
62	2	3	2	2	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3,6
63	1	4	1	1	2	3	3	3	4	3	3	3	3	5	3,4	5	3	4	2	3	3,4	
64	1	1	1	2	3	4	3	4	5	3,8	4	3	3	3	5	3,6	4	3	4	3	4	3,6
65	1	1	3	2	4	4	4	5	4	4,2	5	5	3	4	4	4,2	4	4	5	4	4	4,2
66	1	3	3	4	4	4	5	4	5	4,4	4	5	2	3	4	3,6	5	4	5	4	4	4,4
67	1	4	1	4	4	4	5	4	5	4,4	4	4	3	4	4	3,8	5	4	5	4	4	4,4
68	2	3	3	2	4	5	4	4	5	4,4	4	4	4	4	3	3,8	4	5	4	4	5	4,4
69	1	3	3	1	5	4	4	4	5	4,4	4	5	4	4	4	4,2	5	4	4	5	4	4,4
70	2	1	3	2	4	4	4	4	5	4,2	4	4	4	4	3	3,8	5	4	4	4	4	4,2
71	1	3	1	2	2	2	3	2	3	2,4	2	3	4	5	3	3,4	4	3	4	2	2	3
72	2	2	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	5	4	4	4	4	4,2
73	1	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3,6	5	2	3	2	3	3
74	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3,2	3	3	2	2	3	2,6	5	2	3	3	3	3,2
75	2	1	3	3	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	3	3,8	4	3	4	4	4	3,8
76	1	1	3	4	4	4	4	5	4	4,2	5	4	2	3	4	3,6	5	5	3	4	4	4,2
77	2	1	1	4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3,6	4	4	3	5	4	4
78	1	1	3	1	3	2	3	3	4	3	3	3	4	4	2	3,2	4	3	3	3	2	3
79	1	1	1	2	4	4	4	4	5	4,2	4	3	4	4	3	3,6	4	4	4	4	4	4
80	1	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4,4	5	4	2	4	4	3,8
81	2	3	1	4	2	2	2	2	5	2,6	2	3	3	2	3	2,6	5	2	2	2	2	2,6
82	1	1	1	1	3	3	3	3	4	3,2	3	3	4	4	4	3,6	4	3	4	3	3	3,4
83	1	4	3	3	5	5	5	4	4	4,6	4	4	4	4	3	3,8	5	5	5	5	5	5
84	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2,4	3	2	3	3	3	2,8
85	1	3	3	3	4	3	4	3	3	3,4	3	3	3	3	5	3,4	4	4	4	4	3	3,8
86	1	4	2	4	3	4	3	3	3	3,2	3	4	5	5	4	4,2	4	4	4	3	4	3,8
87	2	3	3	4	4	4	3	5	4	4	5	5	5	5	5	5	3	3	4	4	4	3,6
88	1	1	3	3	4	4	5	5	4	4,4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
89	2	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4,2	4	4	4	4	4	4
90	2	3	3	2	4	4	5	4	5	4,4	4	3	4	4	4	3,8	4	4	5	4	4	4,2
91	2	2	2	3	5	5	5	4	4	4,6	4	4	4	4	3	3,8	5	4	5	5	5	4,8
92	1	1	3	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	3	5	4,2	5	4	4	3	4	4
93	1	3	3	3	5	5	5	4	4	4,6	4	4	4	4	5	4,2	4	5	5	5	5	4,8
94	2	2	3	4	5	5	5	4	4	4,6	4	5	5	5	4	4,6	4	5	5	5	5	4,8
95	1	1	3	3	5	5	5	5	4	4,8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
96	2	2	2	4	5	4	5	5	3	4,4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4,4
97	1	4	3	1	4	4	4	4	3	3,8	4	4	5	5	4	4,4	2	4	4	4	4	3,6
98	2	4	2	4	5	5	4	5	4	4,6	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4,8
99	1	2	2	4	5	5	5	5	2	4,4	5	5	5	4	4	4,6	3	5	5	5	5	4,6

Lampiran 3 Frequency Table Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	56	56,6	56,6	56,6
	Wanita	43	43,4	43,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 25 tahun	26	26,3	26,3	26,3
	26-35 tahun	15	15,2	15,2	41,5
	36-45 tahun	24	24,2	24,2	65,7
	> 41 tahun	34	34,3	34,3	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	37	37,4	37,4	37,4
	Diploma	14	14,1	14,1	51,5
	Sarjana	44	44,4	44,4	95,9
	Pascasarjana	4	4,1	4,1	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Penghasilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rp <1.000.000	12	12,1	12,1	12,1
	Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	31	31,3	31,3	43,4
	Rp 4.000.000 – Rp 5.000.000	27	27,3	27,3	70,7
	> Rp 6.000.000	29	29,3	29,3	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan (Y)

Saya sangat merasakan Kualitas Pembangunan di Desa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	5	5,1	5,1	5,1
KS	20	20,2	20,2	25,3
S	47	47,5	47,5	72,8
SS	27	27,2	27,2	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Kuantitas Pembangunan desa sangat dirasakan oleh masyarakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4,0	4,0	4,0
KS	19	19,2	19,2	23,2
S	57	57,6	57,6	80,8
SS	19	19,2	19,2	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Efektivitas pembangunan desa seperti yang telah di rencanakan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	3	3,0	3,0	3,0
KS	22	22,2	22,2	25,2
S	50	50,5	50,5	75,7
SS	24	24,2	24,2	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Saya merasa puas dengan Pembangunan di desa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4,0	4,0	4,0
KS	19	19,2	19,2	23,2
S	53	53,5	53,5	76,7
SS	23	23,2	23,2	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Kinerja pembangunan desa pasie seubadeh aceh selatan sangat memuaskan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3,0	3,0	3,0
	TS	5	5,1	5,1	8,1
	KS	17	17,2	17,2	25,3
	S	58	58,6	58,6	83,9
	SS	16	16,2	16,2	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Kebijakan Dana Desa (X1)

Masyarakat sangat peduli terhadap pembangunan desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4,0	4,0	4,0
	KS	19	19,2	19,2	23,2
	S	53	53,5	53,5	76,7
	SS	23	23,2	23,2	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Setiap anggaran yang diterima desa selalu melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan pembangunan desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4,0	4,0	4,0
	KS	23	23,2	23,2	27,2
	S	50	50,5	50,5	77,7
	SS	22	22,2	22,2	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Aparatur desa selalu transparasi kepada masyarakat dalam hal anggaran.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4,0	4,0	4,0
	KS	16	16,2	16,2	20,2
	S	48	48,5	48,5	68,7
	SS	31	31,3	31,3	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

**Aparatur desa selalu bertanggung jawab atas segala kebijakan yang di
buat**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3,0	3,0	3,0
	KS	14	14,1	14,1	17,1
	S	56	56,6	56,6	73,7
	SS	26	26,3	26,3	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

**Setiap pelaksanaan pembangunan aparatur desa selalu berpedoman pada
aturan yang berlaku**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2,0	2,0	2,0
	KS	21	21,2	21,2	23,2
	S	51	51,5	51,5	74,7
	SS	25	25,3	25,3	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Manajemen Keuangan Desa (X2)

Manajemen keuangan desa selalu transfaran atas setiap transaksi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2,0	2,0	2,0
	TS	6	6,1	6,1	8,1
	KS	26	26,3	26,3	34,4
	S	45	45,5	45,5	79,9
	SS	20	20,2	20,2	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Pengelolaan dana desa sangat efisien

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	7,1	2,0	2,0
	KS	19	19,2	21,2	23,2
	S	55	55,6	51,5	74,7
	SS	28	18,3	25,3	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Kepala desa dapat mempertanggung jawabkan setiap pengeluaran dana desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	6,1	6,1	6,1
	KS	13	13,1	13,1	19,2
	S	55	55,6	55,6	74,8
	SS	25	25,3	25,3	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Kepala desa sangat memperhatikan keadilan bagi masyarakat nya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	5,1	5,1	5,1
	KS	20	20,2	20,2	25,3
	S	47	47,6	47,6	72,9
	SS	27	27,3	27,3	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Dalam hal keuangan untuk pembangunan kepala desa sangat mengutamakan kepentingan masyarakat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4,0	4,0	4,0
	KS	19	19,2	19,2	23,2
	S	57	57,6	57,6	80,8
	SS	19	19,2	19,2	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Validitas Peningkatan efektivitas program (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,770	,770	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A1	3,97	,946	99
A2	3,92	,977	99
A3	3,96	,871	99
A4	3,96	,739	99
A5	3,80	,749	99

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	15,86	7,739	,645	,459	,848
A2	15,91	7,286	,682	,574	,829
A3	15,59	7,570	,611	,619	,813
A4	15,55	8,545	,413	,547	,839
A5	15,46	8,546	,550	,512	,842

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
19,59	11,991	3,463	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	227,831	96	3,091		
Within People	15,175	2	3,794	11,549	,000
Between Items	124,825	380	,328		
Residual	140,000	384	,365		
Total	367,831	479	,768		

Grand Mean = 3,92

Validitas Kebijakan Dana Desa (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,795	,795	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	3,96	,774	99
B2	3,91	,711	99
B3	4,07	,851	99
B4	4,06	,718	99
B5	4,00	,716	99

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	12,02	3,431	,573	,573	,738
B2	12,01	3,421	,492	,492	,694
B3	11,94	3,154	,497	,497	,730
B4	12,00	3,684	,423	,423	,756
B5	11,44	3,014	,374	,374	,726

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15,99	5,674	0,053	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	134,747	96	0,957		
Within People	,404	3	,135	,437	,727
Between Items	87,846	285	,308		
Residual	88,250	288	,306		
Total	222,997	383	,582		
Total					

Grand Mean = 4,00

Validitas Manajemen Keuangan Desa (X2)

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	99	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,703	,703	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	3,76	,508	99
C2	3,85	,426	99
C3	4,00	,576	99
C4	3,97	,473	99
C5	4,09	,563	99

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	16,67	2,330	,436	,436	,730
C2	16,59	2,581	,701	,701	,749
C3	16,55	2,124	,595	,595	,718
C4	16,66	2,270	,660	,660	,694
C5	16,70	2,171	,670	,670	,723

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
20,79	3,388	0,047	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	64,367	96	,678	2,115	,078
Within People	1,985	3	,335		
Between Items	60,258	380	,159		
Residual	61,600	384	,160		
Total	125,997	479	,263		

Grand Mean = 3,90

Lampiran 10 Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Manajemen Keuangan Desa (X2), Kebijakan Dana Desa(X1) ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Efektivitas Program Pembangunan (Y)
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,887 ^a	,787	,783	,24418

- a. Predictors: (Constant), Manajemen Keuangan Desa (X2), Kebijakan Dana Desa (X1)

ANNOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21,142	2	10,571	177,299	,000 ^b
	Residual	5,724	96	,060		
	Total	26,865	98			

- a. Dependent Variable: Peningkatan efektivitas program (Y)
b. Predictors: (Constant), Manajemen Keuangan Desa (X2), Kebijakan Dana Desa (X1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,957	,915		,915	,362
	Kebijakan Dana Desa (X1)	,254	4,821	,331	4,821	,000
	Manajemen Keuangan Desa (X2)	,694	14,638	,327	14,638	,000

- a. Dependent Variable: Peningkatan efektivitas program (Y)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Peningkatan efektivitas program (Y)	3,9187	,69256	99
Kebijakan Dana Desa (X1)	4,1583	,36812	99
Manajemen Keuangan Desa (X2)	3,9974	,59548	99

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kebijakan Dana Desai (X1)	,833	1,201
	Manajemen Keuangan Desa (X2)	,833	1,201

a. Dependent Variable: Peningkatan efektivitas program (Y)

